



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERLIS SAPUTRA
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN GEOGRAFI PEMBANGUNAN
3. NHK : 812511

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.569.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/104 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 637 m2/3 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
3.	Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 564.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	307.500.000
1.	MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2.	MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
3.	MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4.	MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	113.250.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	858.520.064
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	2.848.270.064



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.848.270.064

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.